

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah pengukuran perbandingan dari [harapan hidup](#), [melek huruf](#), [pendidikan](#) dan [standar hidup](#) untuk semua negara di seluruh dunia termasuk di Indonesia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah [negara maju](#), [negara berkembang](#) atau [negara terbelakang](#) dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang memiliki isu pembangunan manusia yang menarik untuk diteliti. Pembangunan pada dasarnya adalah suatu proses untuk melakukan perubahan pada indikator sosial ekonomi masyarakat menuju kearah yang lebih baik dan berkesinambungan. Dalam menetapkan Indeks Pembangunan Manusia mencakup tiga bidang yaitu kualitas tingkat pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Melalui peningkatan ketiga indikator tersebut diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas hidup manusia.

Konsep pembangunan manusia seutuhnya merupakan konsep yang menghendaki peningkatan kualitas hidup penduduk baik secara fisik, mental maupun secara spritual. Bahkan secara eksplisit disebutkan bahwa pembangunan yang dilakukan menitikberatkan pada pembangunan sumber daya manusia yang seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan sumber daya manusia secara fisik dan mental mengandung makna peningkatan kapasitas dasar penduduk yang kemudian akan memperbesar kesempatan untuk dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan yang berkelanjutan.

Ginting dalam Novita Dewi menyatakan bahwa :

Pembangunan manusia di Indonesia adalah identik dengan pengangguran dan kemiskinan. Investasi dibidang pendidikan dan kesehatan akan lebih berarti bagi

penduduk miskin dibandingkan penduduk tidak miskin, karena aset utama penduduk miskin adalah tenaga kerja mereka. Tersedianya fasilitas pendidikan dan kesehatan murah akan sangat membantu untuk meningkatkan produktivitas masyarakat, dan pada gilirannya meningkatkan pendapatan masyarakat tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembangunan manusia belum secara optimal dilakukan karena hanya terfokus pada pengurangan kemiskinan.¹

Menurut BPS menyatakan :

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek hidup dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran perkapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.²

Keberhasilan pembangunan manusia dapat diketahui dari beberapa faktor yang mendukung IPM. Ada 3 indikator yang mendukung IPM yaitu kesehatan yang diperoleh masyarakat dengan baik, pendidikan yang dicapai, dan tingkat ekonomi yang baik. Ketiga indikator inilah yang menjadi tujuan utama keberhasilan pada tingkat pembangunan manusia. Jika dilihat dari indikator tingkat pendidikan, apabila tingkat pendidikan yang diperoleh masyarakat rendah maka akan membuat masyarakat kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan. Banyaknya penyebab seseorang sulit dalam mencari pekerjaan dapat . Anggota masyarakat mungkin akan memilih jalan lain untuk mendapatkan uang seperti menjadi seorang pengemis, mencuri, bahkan mereka sendiri mampu menjual diri.

¹ Novita Dewi. "Pengaruh Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau", **Jurnal JOM Fekon**, vol. 4, no. 1, february 2008, hal.871

²Badan Pusat Statistik, "Indeks Pembangunan Manusia,"<https://sumut.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html#subjekViewTab1>. (Diakses tanggal 29 November 2019.)

Faktor kemiskinan menjadi salah satu alasan masyarakat tidak bisa mendapat pendidikan yang layak. Bukan saja dalam pendidikan, masyarakat juga tidak bisa mendapatkan kesehatan yang layak. Masyarakat menyadari bahwa tingginya biaya pendidikan dan rendahnya pendapatan yang didapat akan membuat masyarakat tidak bisa mendapat pendidikan bahkan yang sudah sekolah harus putus sekolah. Rendahnya perekonomian masyarakat membuat masyarakat kesulitan untuk mendapatkan pengobatan yang baik. Rendahnya pendidikan yang didapat oleh masyarakat terutama anak-anak membuat orang tua sering membuat anak-anak untuk bekerja walaupun mereka belum tergolong tenaga kerja. Masalah kemiskinan ini dihadapi pemerintah setiap negara, namun setiap negara mempunyai cara tersendiri untuk mengatasinya.

Untuk itu pemerintah di Indonesia harus mengambil kebijakan dalam mengatasi masalah kemiskinan dan mengurangi pengangguran. Pemerintah mengambil kebijakan dengan cara membuat sekolah gratis minimal 12 tahun untuk dapat membantu dalam dunia pendidikan. Kebijakan pemerintah ini dapat membantu anak-anak untuk mendapat pendidikan yang baik sehingga mereka bisa terus bersekolah. Pada kebijakan ini pemerintah bisa membantu masyarakat mendapatkan hidup yang layak, pekerjaan yang layak dan mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia. Dengan demikian akan membantu negara untuk meningkatkan pembangunan manusia menjadi lebih baik.

Selain itu, pemerintah juga mengambil kebijakan dalam bidang kesehatan dengan membuat kartu BPJS bagi semua kalangan untuk membantu masyarakat mendapatkan hidup yang sehat. Dengan adanya kebijakan ini, seluruh masyarakat bisa mendapatkan pengobatan yang baik. Penanganan pada pengguna BPJS juga tidak dibedakan dengan penanganan tanpa BPJS karena pemerintah sendiri sudah mengharuskan setiap masyarakat menggunakan BPJS termasuk BPJS ketenagakerjaan.

Bisa diketahui bahwa jika tingkat pendidikan rendah maka pengangguran akan meningkat dan menyebabkan masyarakat miskin meningkat. Jika kemiskinan terus meningkat maka indeks pembangunan manusia akan menurun. Jika masyarakat terus menerus mengacuhkan pendidikan maka harapan untuk mendapat pekerjaan akan sulit sehingga pengangguran akan semakin tinggi dan hal itu bukan hanya menyebabkan tingkat kemiskinan semakin tinggi tetapi juga IPM menjadi rendah. Hal demikian bukan hanya terjadi secara rasional tetapi juga dalam regional (provinsi).

Data IPM, pengangguran terbuka, kemiskinan, anggaran pendidikan, anggaran kesehatan di provinsi Sumatera Utara disajikan pada Tabel 1.1. Indeks pembangunan manusia di Sumatera Utara terus mengalami peningkatan. Capaian IPM yang terus meningkatkan dari tahun ke tahun dan menjadi acuan dan pertanda bahwa kualitas pembangunan di Sumatera Utara semakin membaik. Angka IPM tahun 2013 mencapai 68,36 persen dan tahun 2018 mencapai 71,18 persen atau naik sebesar 2,82 selama 6 tahun. Hal ini tentunya membuat Sumatera Utara meningkatkan tujuan menciptakan masyarakat maju, mandiri, berdaya asaing, dan berwawasan lingkungan.

Tabel 1.1 Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran, Kemiskinan, Anggaran Pendidikan, dan Anggaran Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tahun 2013-2018

Tahun	IPM (%)	Pengangguran Terbuka (%)	Kemiskinan (%)	Anggaran Pendidikan (Rp Miliar)	Anggaran Kesehatan (Rp Miliar)
2013	68.36	6.45	10.39	272,544	297,944
2014	68.87	6.23	9.85	329,608	401,700
2015	69.51	6.39	10.09	329,959	398,538
2016	70.0	5.84	9.27	371,000	453,765
2017	70.57	5.60	9.28	476,713	591,567
2018	71.18	5.56	9.22	554,813	765,924

Sumber :*Badan Pusat Statistik Sumatera Utara dan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Indonesia*

Seiring dengan peningkatan IPM dari tahun ke tahun, tingkat pengangguran terbuka mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Tingkat pengangguran terbuka mengalami kenaikan tahun 2014-2015 sebesar 0,16 persen dan kembali menurun dari tahun 2015-2018. Secara keseluruhan, tingkat pengangguran terbuka ini cenderung menurun. Hal ini menjadi petunjuk tingginya niat masyarakat dalam mendapat pekerjaan dan membuka lapangan pekerjaan sehingga mengurangi pengangguran di provinsi Sumatera Utara.

Berbeda halnya dengan tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan lebih fluktuatif. Kemiskinan mengalami kenaikan pada tahun 2014-2015 sebesar 0,24 persen dan mengalami penurunan dari tahun 2015-2016 sebesar 0,82. Dari data dapat dilihat walaupun datanya mengalami naik turun namun perubahannya mulai membaik. Pada data kemiskinan bisa dilihat bahwa masyarakat Sumatera Utara mulai berusaha untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan perekonomiannya.

Pada anggaran pendidikan di Sumatera Utara setiap tahunnya selalu meningkat. Dapat dilihat dari data anggaran pendidikan semakin membaik dan semakin tinggi anggaran yang dikeluarkan pemerintah setiap tahun. Dapat dilihat pada data anggaran pendidikan 2013 sebesar Rp 272,544 miliar dan terus menaik setiap tahun nya sampai pada tahun 2018 sebesar Rp 554,813 miliar. Pada peningkatan ini bisa diketahui bahwa semakin tingginya pemerintah dalam meningkatkan bantuan seperti dana bos, beasiswa, bidikmisi, dan yang lain kepada anak-anak yang ingin bersekolah.

Demikian juga anggaran kesehatan setiap tahunnya mulai membaik. Pada tahun 2014-2015 anggaran kesehatan mengalami penurunan sebesar 3,162 milyar. Pada tahun 2015-2018 dapat dilihat anggaran kesehatan mengalami peningkatan sebesar Rp 367,386 miliar. Kenaikan

yang cukup tinggi ini dapat dilihat bahwa masyarakat mendapat kesehatan yang layak dan mendapat perawatan yang mulai membaik. Bantuan yang diberikan pemerintah seperti BPJS, ASKES, dan yang lainnya sangat membantu masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan masyarakat yang lebih baik.

Berdasarkan uraian di atas, tampaknya ada hubungan yang searah antara tingkat pengangguran terbuka dengan kemiskinan serta anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan dengan meningkatnya angka IPM. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengaruh Pengangguran Terbuka, Kemiskinan, Anggaran Pendidikan, dan Anggaran Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008-2018”**.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap Indeks Pembangunan Manusia di provinsi Sumatera Utara tahun 2008-2018 ?
2. Bagaimanakah pengaruh tingkat kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di provinsi Sumatera Utara tahun 2008-2018 ?
3. Bagaimanakah pengaruh anggaran pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di provinsi Sumatera Utara tahun 2008-2018 ?
4. Bagaimanakah pengaruh anggaran kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di provinsi Sumatera Utara tahun 2008-2018 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap Indeks Pembangunan Manusia di provinsi Sumatera Utara tahun 2008-2018.
2. Mengetahui pengaruh tingkat kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di provinsi Sumatera Utara tahun 2008-2018.
3. Mengetahui pengaruh anggaran pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di provinsi Sumatera Utara tahun 2008-2018.
4. Mengetahui pengaruh anggaran kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di provinsi Sumatera Utara tahun 2008-2018.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi :

1. Pemerintah di Provinsi Sumatera Utara dalam mengevaluasi kebijakan terhadap kualitas hidup penduduk dalam Indeks Pembangunan Manusia.
2. Sebagai referensi dan literasi terhadap penelitian lanjutan yang mungkin dikerjakan orang lain.
3. Bagi peneliti, sebagai sarana untuk berlatih dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai tambahan untuk memperoleh gambaran mengenai indeks pembangunan manusia.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Indeks Pembangunan Manusia

Dalam rangka pembangunan bangsa dibutuhkan modal manusia yang memenuhi kualifikasi keterampilan, pengetahuan dan kompetensi pada berbagai bidang keahlian. Oleh karena itu diperlukan tolak ukur yang digunakan untuk menilai kualitas pembangunan manusia, sebagaimana yang ditetapkan oleh *United Nation Development Programme (UNDP)* dalam teori Indeks Pembangunan Manusia yaitu suatu pendekatan yang digunakan sebagai tolak ukur tinggi rendahnya pembangunan manusia.

Mulyadi dalam Novita Dewi menyatakan :

Peningkatan kualitas manusia dapat dipenuhi dengan berbagai kebijakan, yaitu pembangunan pendidikan akan memperhatikan arah pembangunan ekonomi dimasa yang akan datang, pembangunan kesehatan mendapat perhatian dengan menanamkan budaya hidup sehat serta memperluas cakupan dan mutu pelayanan kesehatan, untuk penduduk miskin peningkatan kualitasnya dilakukan dengan memberikan keterampilan praktis, menumbuhkan sikap produktif serta mendorong semangat keswadayaan dan kemandirian untuk bersama melepaskan diri dari kemiskinan menekan laju pertumbuhan penduduk dengan meningkatkan pelaksanaan gerakan KB, meningkatkan keseimbangan kepadatan dan penyebaran penduduk.³

Unsur dasar Indeks Pembangunan Manusia membahas tentang tiga unsur utama :

Untuk mengukur IPM maka digunakan 3 unsur dasar pembangunan manusia yaitu:

1. Usia Harapan Hidup

Usia harapan hidup mencerminkan usia maksimum yang diharapkan seseorang untuk dapat bertahan hidup. Pembangunan manusia harus lebih mengupayakan agar penduduk dapat mencapai usia harapan hidup yang panjang. Indikator harapan hidup ini meliputi:

a. Angka kematian bayi.

³Novita Dewi, *Op.cit*, Hal. 871.

- b. Penduduk yang diperkirakan tidak mencapai usia 40 tahun.
- c. Persentase penduduk dengan keluhan kesehatan.
- d. Persentase penduduk yang sakit “morbiditas”.
- e. Rata-rata lama sakit.
- f. Persentase penduduk yang melakukan pengobatan sendiri.
- g. Persentase kelahiran ditolong yang ditolong oleh tenaga medis.
- h. Persentase balita kekurangan gizi.
- i. Persentase rumah tangga yang mempunyai akses ke sumber air minum bersih.
- j. Persentase rumah tangga yang menghuni rumah berlantai tanah.
- k. Persentase penduduk tanpa akses terhadap fasilitas kesehatan.
- l. Persentase rumah tangga tanpa akses terhadap sanitasi.

2. Pengetahuan

Pengetahuan dalam hal ini tingkat pendidikan juga diakui secara luas sebagai unsur mendasar dari pembangunan manusia, indikator pendidikan ini meliputi:

- a. Angka melek huruf.
- b. Rata-rata lama sekolah.
- c. Angka partisipasi sekolah.
- d. Angka putus sekolah “Drop Out/DO” dan lain-lain.

3. Standar Hidup Layak

Unsur dasar pembangunan manusia yang ketiga ialah standar hidup layak Indikator standar hidup layak bisa dilihat dari daya beli masyarakat yang meliputi:

- a. Jumlah yang bekerja.
- b. Jumlah pengangguran terbuka.
- c. Jumlah dan persentase penduduk miskin.
- d. PDRB riil per kapita.⁴

Indeks Pembangunan Manusia memiliki tiga dimensi yang digunakan sebagai dasar perhitungannya, yaitu:

1. Umur Panjang dan hidup sehat yang diukur dengan angka harapan hidup saat kelahiran.
2. Pengetahuan yang dihitung dari angka harapan sekolah dan angka rata-rata lama sekolah.
3. Standar hidup layak yang dihitung dari Produk Domestik Bruto.

Pilihan-pilihan tambahan yang dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat luas seperti kebebasan politik, ekonomi dan sosial, sampai kesempatan untuk menjadi kreatif dan produktif, dan

⁴Samhis Setiawan, “Indeks Pembangunan Manusia” Pengertian & (Sejarah – Unsur Dasar), <https://www.gurupendidikan.co.id/indeks-pembangunan-manusia-pengertian-sejarah-unsur-dasar>. (Diakses tanggal 29 November 2019).

menikmati kehidupan yang sesuai dengan harkat pribadi dan jasmani hak-hak azasi manusia merupakan bagian dari paradigma tersebut.

Konsep pembangunan manusia memang terdengar berbeda dari konsep klasik pembangunan yang memberikan perhatian utama pada pertumbuhan ekonomi. Pada konsep ini banyak hal yang diperhatikan untuk meningkatkan pembangunan manusia. Hal yang harus diperhatikan pada pembangunan manusia dalam semua aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, politik, budaya dan lingkungan. Oleh karena itu, fokus utama pembangunan manusia adalah pada manusia dan kesejahteraannya.

2.2 Pengangguran

2.2.1 Arti Pengangguran

Pengangguran adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada yang mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya.

Sukirno dalam Farid Nugraha menyatakan bahwa :

Permasalahan pengangguran memang sangat kompleks untuk dibahas dan merupakan isu penting, karena dapat dikaitkan dengan beberapa indikator. Indikator-indikator ekonomi yang mempengaruhi tingkat pengangguran antara lain pertumbuhan ekonomi negara bersangkutan, tingkat inflasi, serta besaran upah yang berlaku. Apabila di suatu negara pertumbuhannya mengalami kenaikan, diharapkan akan berpengaruh pada penurunan jumlah pengangguran. Jika tingkat upah naik akan berpengaruh pada penurunan jumlah pengangguran

pula. Sedangkan tingkat inflasi yang tinggi akan berpengaruh pada kenaikan jumlah pengangguran.⁵

2.2.2 Jenis Pengangguran Berdasarkan Cirinya

Berdasarkan cirinya, pengangguran dapat digolongkan atas 4 golongan menurut Sadono Sukirno pengangguran tersebut adalah :

- a. **Pengangguran Terbuka**
Pengangguran ini tercipta sebagai akibat pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja. Efek dalam keadaan ini di dalam suatu jangka masa yang cukup panjang mereka tidak melakukan sesuatu pekerjaan. Jadi mereka menganggur secara nyata dan sepenuh waktu, dan oleh karenanya dinamakan pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka dapat pula wujud sebagai akibat dari kegiatan ekonomi yang menurun, dari kemajuan teknologi yang mengurangi penggunaan tenaga kerja, atau sebagai akibat dari kemunduran perkembangan sesuatu industri.
- b. **Pengangguran Tersembunyi**
Pengangguran ini terutama wujud di sektor pertanian atau jasa. Setiap kegiatan ekonomi memerlukan tenaga kerja, dan jumlah tenaga kerja yang digunakan tergantung kepada banyak faktor. Antara lain faktor yang perlu dipertimbangkan adalah besar atau kecilnya perusahaan, jenis kegiatan perusahaan, mesin yang digunakan dan tingkat produksi yang dicapai. Di banyak negara berkembang seringkali didapati bahwa jumlah pekerjaan dalam suatu kegiatan ekonomi adalah lebih banyak dari yang sebenarnya diperlukan supaya ia dapat menjalankan kegiatannya dengan efisien. Kelebihan tenaga kerja yang digunakan digolongkan dalam pengangguran tersembunyi. Contohnya ialah pelayan restoran yang lebih banyak dari yang diperlukan dan keluarga petani dengan anggota keluarga yang besar yang mengerjakan luas tanah yang sangat kecil
- c. **Pengangguran Bermusim**
Pengangguran ini terutama terdapat di sektor pertanian dan perikanan. Pada musim hujan penyedap karet dan nelayan tidak dapat melakukan pekerjaan mereka dan terpaksa menganggur. Pada musim kemarau pula para pesawah tidak dapat mengerjakan tanahnya. Apabila dalam masa diatas para penyedap karet, nelayan dan pesawah tidak melakukan pekerjaan lain maka mereka terpaksa menganggur. Pengangguran inilah yang disebut pengangguran bermusiman.
- d. **Setengah Menganggur**
Dinegara-negara berkembang penghijraan atau migrasi dari desa kekota adalah sangat pesat. Sebagai akibatnya tidak semua orang yang pindah

⁵ Farid Nugraha, “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengangguran di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2014 dengan Metode Panel Data”, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia, hal.4. (skripsi tidak diterbitkan)

kekota dapat memperoleh pekerjaan dengan mudah. Disamping itu ada pula yang tidak menganggur, tetapi tidak pula bekerja sepenuh waktu dan jam kerja mereka adalah jauh lebih rendah dari yang normal. Mereka mungkin hanya berkerja satu hingga dua hari seminggu atau satu hingga empat jam sehari. Pekerjaan-pekerjaan yang mempunyai masa kerja seperti yang dijelaskan ini digolongkan sebagai setengah menganggur.⁶

2.2.3 Mengukur Tingkat Pengangguran

“ Tingkat pengangguran adalah perbandingan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja dan dinyatakan dalam persen. Tingkat

$$\text{Pengangguran} = \frac{\text{jumlah pengangguran}}{\text{jumlah angkatan kerja}} \times 100\%⁷ “$$

2.3 Kemiskinan

2.3.1 Arti Kemiskinan

Kemiskinan dapat diartikan sebagai keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, dan air minum. Hal tersebut sangat berhubungan erat dengan kualitas hidup. Secara ekonomi, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang.

Suliswanto dalam Ahmad Syaifullah dan Nazaruddin Malik menyatakan:

Masalah kemiskinan ini, sadar atau tidak sadar adalah masalah yang selalu di hadapi manusia, dapat dikatakan dimana ada manusia disitu ada kemiskinan, hampir setiap Negara pernah bahkan sedang mengalami kondisi kemiskinan

⁶ Sadono Sukirno, **Makroekonomi Teori Pengantar**, Edisi Ketiga, Cetakan 19, Jakarta : Rajawali Pers, 2016. hal. 330-331.

⁷ Payaman J. Simanjuntak, **Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia**, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, tahun 1993, hal. 36.

namun tentunya setiap Negara memiliki solusi yang berbeda untuk mengatasinya. Dari kemiskinan inilah timbul berbagai macam masalah social yang komplit, lihat saja disepanjang jalanan kota maupun desa semakin banyaknya gepeng di pinggir-pinggir jalan bertebaran, PSK semakin bertambah dan semakin bertambah pula anak jalanan yang terkenal razia, bisa'dipastikan 90%'faktor utama nya ialah kondisi ekonomi yang rendah, belum lagi soal meningkatnya jumlah anak putus sekolah yang disebabkan ketidak mampuannya untuk memenuhi kebutuhan sekolah dimana setiap tahunnya selalu saja meningkat jumlahnya yang dalam hal ini di gambarkan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), anak-anak dibawah umur sudah menjadi pengemis, hal tersebut semakin jelas bahwa kemiskinan itu benar-benar ada setiap negara.⁸

Kemiskinan bukan hanya kekurangan uang ataupun tingkat pendapatan yang rendah, tetapi juga banyak hal lain seperti: keterbatasan sumber daya, tingkat kesehatan rendah, pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, kerentanan terhadap ancaman tindak kriminal, ketidakberdayaan menghadapi kekuasaan, dan ketidakberdayaan dalam menentukan jalan hidupnya sendiri.

2.3.2. Faktor Penyebab Kemiskinan

Ditinjau dari sumber penyebabnya, kemiskinan dapat dibagi menjadi kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang mengacu pada sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup dan budayanya. Kemiskinan kultural biasanya dicirikan oleh sikap individu atau kelompok masyarakat yang merasa tidak miskin meskipun jika diukur berdasarkan garis kemiskinan termasuk kelompok miskin. Sedangkan kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh struktur masyarakat yang timpang, baik karena perbedaan kepemilikan, kemampuan, pendapatan dan kesempatan kerja yang tidak seimbang maupun karena distribusi pembangunan dan hasilnya

⁸ Ahmad Syaifullah dan Nazaruddin Malik, "Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Produk Domestik Bruto Terhadap Tingkat Kemiskinan di ASEAN-4" (Studi Pada 4 Negara ASEAN), Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia, **Jurnal Ilmu Ekonomi**, vol.1, jilid.1, 2017, hal.108

yang tidak merata. Kemiskinan struktural biasanya dicirikan oleh struktur masyarakat yang timpang terutama dilihat dari ukuran-ukuran ekonomi.

2.3.3 Jenis-jenis Kemiskinan

Elvis F. Purba, Juliana L.Tobing, dan Dame Esther Hutabarat menyatakan ada 4 jenis kemiskinan, yaitu :

- 1) **Kemiskinan absolut:** adalah suatu konsep yang pengukurannya tidak didasarkan pada garis kemiskinan tetapi pada ketidakmampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan minimum dimaksud antara lain sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan.
- 2) **Kemiskinan relatif:** adalah suatu konsep yang mengacu pada garis kemiskinan (*poverty line*) yang sebenarnya merupakan suatu ukuran mengenai ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Kondisi ini disebabkan pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan dalam pendapatan.
- 3) **Kemiskinan Kultural** adalah suatu konsep yang mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemborosan, dan tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar.
- 4) **Kemiskinan Struktural** adalah suatu konsep kemiskinan yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumberdaya.⁹

2.4 Anggaran Pendidikan

Biaya pendidikan adalah biaya yang mencakup semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan. Anggaran pendidikan dapat dikatakan juga sebagai anggaran bantuan dalam dunia pendidikan seperti bantuan bidikmisi atau beasiswa kepada siswa atau mahasiswa yang kurang mampu untuk melanjutkan pendidikannya dengan bantuan dari pemerintah. Supriadi dalam Sri Citra Diah Nandani, Bambang Setyadin, dan Ahmad Nurabadi, "biaya (*cost*) dalam pengertian ini memiliki cakupan luas, yakni semua jenis

⁹ Elvis F. Purba, Juliana L.Tobing, dan Dame Esther Hutabarat, **Ekonomi Indonesia**, Edisi Kedua, Cetak 3, Medan : Universitas HKBP Nommensen, 2015, hal. 75

pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang maupun barang dan tenaga”.¹⁰

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan disebutkan bahwa biaya pendidikan meliputi:

- a. Biaya satuan pendidikan.
- b. Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan.
- c. Biaya pribadi peserta didik.

Susye Marlen Ketsy Lengkong, Debby Ch. Rotinsulu, dan Een N. Walewangko menyatakan :

Struktur anggaran pendidikan sendiri dalam APBN adalah alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui kementerian Negara/lembaga, alokasi anggaran pendidikan melalui transfer daerah, dan alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan, termasuk gaji pendidik tetapi tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan, untuk membiayai penyelenggara pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah (pasal 1 butir 40 UU no.4 tahun 2012 tentang perubahan atas UU no.22 tahun 2011 tentang APBN tahun anggaran 2012). Berdasarkan definisi di atas, maka struktur Anggaran Pendidikan dalam APBN terbagi menjadi tiga bagian yaitu :

Pertama : Anggaran pendidikan melalui belanja pemerintah pusat. Kedua : Anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah.

Ketiga : Anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan.¹¹

2.5 Anggaran Kesehatan

Anggaran kesehatan adalah besarnya dana yang harus dikeluarkan untuk menyelenggarakan dan atau memanfaatkan berbagai upaya kesehatan yang diperlukan oleh perorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat.

Pengertian pembiayaan tersebut merujuk pada dua sudut pandang berikut:

¹⁰ Sri Citra Diah Nandani, Bambang Setyadin, Ahmad Nurabadi, Analisis Alokasi Anggaran Pendidikan Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, **Jurnal Adminitrasi dan Manajemen Pendidikan**, Vol. 1, No. 1, Maret 2018, hal. 22.

¹¹ Susye Marlen Ketsy Lengkong, Debby Ch. Rotinsulu, dan Een N. Walewangko, ”**Pengaruh Alokasi Anggaran Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Bitun**”, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam ratulangi, hal. 2-3.(skripsi tidak diterbitkan)

1. Penyelenggara pelayanan kesehatan (*health provider*) yaitu besarnya dana untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang berupa dana investasi serta dana operasional.
2. Pemakai jasa pelayanan (*health consumer*) yaitu besarnya dana yang dikeluarkan untuk dapat memanfaatkan suatu upaya kesehatan.

Pembangunan bidang kesehatan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan nasional ataupun pembangunan daerah. Kesehatan merupakan hak asasi dan investasi serta tanggung jawab bersama, oleh karena itu perlu perhatian khusus dan kerjasama semua pihak atau lintas sektor guna mewujudkan derajat kesehatan yang optimal dari masyarakat.

Dalam pelaksanaan desentralisasi tidak terlepas dari berbagai masalah yang timbul diantaranya kurangnya komitmen Pemerintah Daerah dalam pembangunan kesehatan, masih kurangnya pelayanan bagi penduduk miskin serta kurangnya kemampuan staf daerah serta. Selain masalah tersebut masalah kualitas dan pembiayaan pelayanan kesehatan. Sektor kesehatan tentunya akan bersaing dengan sektor lain supaya memperoleh alokasi dana yang cukup untuk program pelayanan bagi masyarakat.

Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan dalam Estherlina Sitorus dan Atik Nurwahyuni menyatakan bahwa :

Anggaran fungsi kesehatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2016 mengalami kenaikan menjadi 5,05% atau sebesar Rp 109 triliun bila dibandingkan Tahun 2015 sebesar Rp 75 triliun (3,45 % dari APBN). Sedangkan berdasarkan data kesehatan dunia Tahun 2014 (*World Health Report 2014*) dalam pendanaan kesehatan negara-negara di Asia Tenggara, Singapura adalah negara di Asia Tenggara yang mengalokasikan biaya kesehatan tertinggi 14% PDB, disusul Thailand (13%) dan Vietnam(13%).¹²

¹² Estherlina Sitorus dan Atik Nurwahyuni, “Analisis Pembiayaan Kesehatan Bersumber Pemerintahan di Kota Serang Tahun 2014 – 2016”, **Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia**, Vol. 6. No.3, September 2017, Hal. 138-139.

Pembangunan bidang kesehatan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan nasional ataupun pembangunan daerah. Kesehatan merupakan hak asasi dan investasi serta tanggung jawab bersama, oleh karena itu perlu perhatian khusus dan kerjasama semua pihak atau lintas sektor guna mewujudkan derajat kesehatan yang optimal dari masyarakat.

2.6 Hubungan Antara Variabel Independen dengan Variabel Dependen

2.6.1 Hubungan antara Pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia

Soeharsono Sagir dalam Perry Pangabahan mengemukakan bahwa:

Kemiskinan bisa dan biasa disertai dengan gejala pengangguran. Orang yang menganggur menderita kemiskinan karena tidak punya nafkah yang bisa diperoleh dari pekerjaan. SDM berperan sebagai modal pembangunan. Pemerintah harus bekerja keras untuk menciptakan SDM yang bermutu dan siap bersaing di dunia kerja mengingat iklim kompetisi global yang tambah ketat. Modal diperlukan agar usaha bisa berjalan lancar. Pemerintah harus mampu menjaga kualitas SDM agar dampak buruk pembangunan seperti pencemaran darat, laut, udara dapat tercegah.¹³

Dengan teratasinya pengangguran, maka pemerintah dapat meningkatkan kualitas SDM yang bermutu dan siap bersaing dalam dunia kerja dan meningkatkan kualitas kesejahteraan penduduk yang mampu memperbaiki perekonomian masyarakat.

2.6.2 Hubungan antara Kemiskinan dengan Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh kebanyakan negara sedang berkembang, kemiskinan merupakan sebuah masalah yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain pengangguran, pendidikan, kesehatan dan tingkat pendapatan masyarakat. Untuk mengurangi tingkat kemiskinan diperlukan upaya pembangunan untuk

¹³ Perry Pangabahan Hutagalung, “Analisis Pengaruh Kemiskinan, Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara tahun 2008-2017”. Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen Medan, 2009, hal. 20. (skripsi tidak diterbitkan)

meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Dampak negatif yang disebabkan oleh kemiskinan adalah dapat mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara. Kemiskinan yang tinggi akan menyebabkan biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan pembangunan ekonomi menjadi lebih besar.

Sinaga dalam Fungu Sitio menyatakan bahwa “Rendahnya produktivitas kaum miskin dapat disebabkan oleh rendahnya akses mereka untuk memperoleh pendidikan, kesehatan dan sebagainya”.¹⁴

2.6.3 Hubungan antara Anggaran Pendidikan dan Indeks Pembangunan Manusia

Wahid dalam Merang Kahang, Muhammad Saleh, dan Rachmad Budi Suharto menyatakan bahwa :

Investasi dalam hal pendidikan mutlak dibutuhkan maka pemerintah harus dapat membangun suatu sarana dan sistem pendidikan yang baik. Alokasi anggaran pengeluaran pemerintah terhadap pendidikan merupakan wujud nyata dari investasi untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Pengeluaran pembangunan pada sektor pembangunan dapat dialokasikan untuk penyediaan infrastruktur pendidikan dan menyelenggarakan pelayanan pendidikan kepada seluruh penduduk Indonesia secara merata. Anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN merupakan wujud realisasi pemerintah untuk meningkatkan pendidikan.¹⁵

Berdasarkan uraian di atas pemerintah berperan aktif dalam anggaran pendidikan untuk dapat meningkatkan produktivitas masyarakat. Dengan adanya anggaran pendidikan ini dapat membantu masyarakat miskin untuk melanjutkan pendidikannya sehingga tingkat pendidikan akan menjadi lebih tinggi dan tingkat kemakmuran masyarakat menjadi lebih baik lagi.

2.6.4 Hubungan antara Anggaran Kesehatan dan Indeks Pembangunan Manusia

¹⁴Fungu Sariando Sitio, “Analisis Pengaruh IPM, Pengangguran, Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2000-2017”, Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen, 2019, hal. 14. (Skripsi tidak diterbitkan).

¹⁵ Merang Kahang, Muhammad Saleh dan Rachmad Budi Suharto ” Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kutai Timur”. **Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi** .Vol. 18, No. 2, 2016, hal. 133.

Menurut Tjiptoherijanto, dan Astri dalam Merang Kahang, Muhammad Saleh, dan Rachmad Budi Suharto menyatakan :

Melihat mutu manusia dari sisi kesehatan dimana kesehatan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi sumber daya manusia, dengan kata lain aspek kesehatan turut mempengaruhi kualitas manusia. Kekurangan kalori, gizi, ataupun rendahnya derajat kesehatan bagi penduduk akan menghasilkan kualitas manusia yang rendah dengan tingkat mental yang terbelakang.¹⁶

Berdasarkan urian diatas kesehatan sangat penting dalam meningkat kesejahteraan masyarakat untuk dapat menjadikan kualitas pembangunan manusia menjadi lebih baik.

2.7 Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini akan memuat tentang penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya yang mendasari pemikiran penulis dan menjadi pertimbangan dalam penyusunan skripsi ini. Adapun penelitian terdahulu tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penelitian M. Alyuriza Syalkahfi dengan judul “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung tahun 1999-2014.” Dinyatakan bahwa :

Pertumbuhan Ekonomi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung. Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung. Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung.¹⁷

¹⁶ Ibid, hal. 133-134

¹⁷ M. Alyuriza Syalkahfi, ”Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung Tahun 1999-2014”, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis-Universitas Lampung , 2018. hal. 73 (Skripsi tidak dipublikasikan).

2. Penelitian Rizki Nurfadhli dengan judul “Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Sumatera Periode tahun 2010-2015”. Dinyatakan bahwa :

Pengeluaran pemerintah melalui APBD di bidang kesehatan berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Pulau Sumatera, Pengeluaran pemerintah melalui APBD di bidang pendidikan tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Pulau Sumatera, PDRB berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Pulau Sumatera, tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Pulau Sumatera, tingkat kemiskinan tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Pulau Sumatera.¹⁸

3. Penelitian Perry Pangabahan Hutagalung dengan judul “Analisis Pengaruh Kemiskinan, Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara tahun 2008-2017.” Dinyatakan bahwa :

Kemiskinan memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara periode 2008-2017. Pengangguran memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara periode 2008-2017. Pertumbuhan Ekonomi memiliki pengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara periode 2008-2017, seharusnya harapan teoritis berpengaruh positif.¹⁹

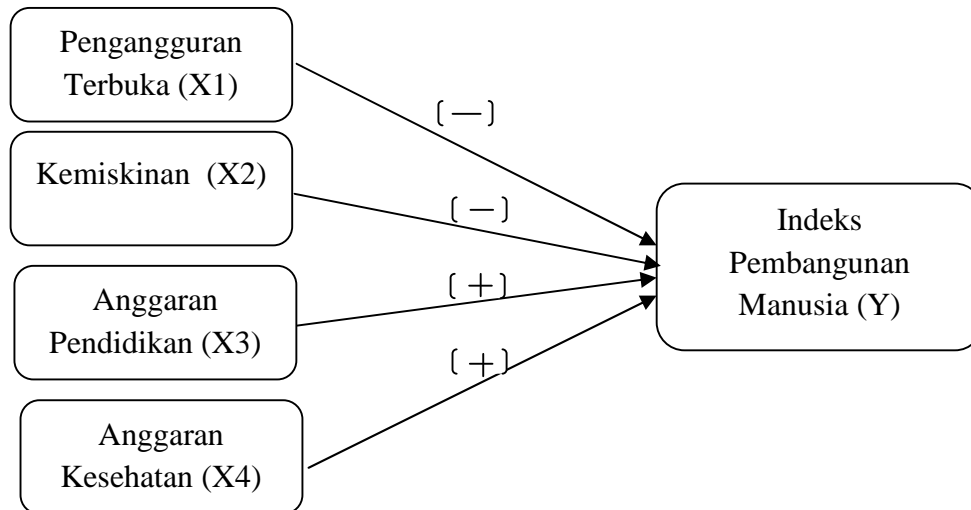
2.8 Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian dalam penelitian ini ada empat variabel independen, antara lain pengangguran, kemiskinan, anggaran kesehatan, dan anggaran pendidikan. Kemiskinan adalah keadaan dimana ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan, pengangguran digunakan untuk menggambarkan kemampuan struktur perekonomian dalam penyediaan lapangan pekerjaan, dan pertumbuhan

¹⁸ Rizki Nurfadhli dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Sumatera periode tahun 2010-2015”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, hal. 87 (skripsi tidak dipublikasikan).

¹⁹ Perry Pangabahan Hutagalung, *Op.cit*, hal. 32

ekonomi kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik. Ketiga variabel tersebut merupakan variabel independen, bersama-sama dengan indeks pembangunan manusia sebagai variabel dependen akan diregresikan untuk mengetahui tanda koefisien regresi dan tingkat signifikasinya. Dengan hasil regresi tersebut diharapkan dapat menjawab hipotesis penelitian.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.9 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang ada dimana kebenarannya masih perlu dikaji dan diteliti melalui data yang terkumpul. Pada dasarnya hipotesis merupakan suatu pernyataan tentang hakikat dan hubungan antara variabel – variabel yang dapat diuji secara empiris.

Berdasarkan latar belakang dan kajian pustaka dan penelitian terdahulu, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara 2008-2018.

2. Kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara 2008-2018.
3. Anggaran pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara 2008-2018.
4. Anggaran kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara 2008-2018.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah di Sumatera Utara, dengan menganalisis pengaruh pengangguran, kemiskinan, anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Utara periode 2008-2018.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data adalah data sekunder dalam bentuk angka yang diambil dalam runtut waktu dengan kurun waktu 2008-2018. Sumber data adalah dari Badan Pusat Statistik Sumatera Utara dan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kemenkeu Indonesia. Selain itu diambil dari website, jurnal, laporan-laporan serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.3 Metode Analisis Data

Model yang digunakan untuk menganalisis pengaruh pengangguran, kemiskinan, anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan terhadap IPM di Provinsi Sumatera Utara periode 2008-2018 adalah model ekonometrik.

Model analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis statistik berupa regresi linier berganda dengan model ekonometrik double Ln sebagai berikut:

$$\ln Y_i = \ln \hat{\beta}_0 + \ln \hat{\beta}_1 X_1 + \ln \hat{\beta}_2 X_2 + \ln \hat{\beta}_3 X_3 + \ln \hat{\beta}_4 X_4 + \varepsilon_i; i=1,2,3,\dots,n$$

Dimana :

Y = Indeks Pembangunan Manusia

$\hat{\beta}_0$ = Intersep

$\hat{\beta}_1, \hat{\beta}_2, \hat{\beta}_3, \hat{\beta}_4$ = Koefisien regresi (Statistik)

X_1 = Pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera Utara (persen)

X_2 = Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara (persen)

X_3 = Anggaran pendidikan di Provinsi Sumatera Utara (Rp)

X_4 = Anggaran kesehatan di Provinsi Sumatera Utara (Rp)

i = Galat (Error Term)

3.4 Pengujian Hipotesis

3.4.1 Uji Secara Individu (Uji-t)

1. Pengangguran Terbuka (X_1)

$H_0 : \hat{\beta}_1 = 0$, artinya pengangguran terbuka tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM.

$H_1 : \hat{\beta}_1 < 0$ artinya pengangguran terbuka berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM .

2. Kemiskinan (X_2)

$H_0 : \hat{\beta}_2 = 0$ artinya kemiskinan tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM.

$H_1 : \hat{\beta}_2 < 0$ artinya kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM.

3. Anggaran Pendidikan (X3)

$H_0 : \hat{\beta}_3 = 0$ artinya anggaran pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM.

$H_1 : \hat{\beta}_3 > 0$ artinya anggaran pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.

4. Anggaran Kesehatan (X4)

$H_0 : \hat{\beta}_4 = 0$ artinya anggaran kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM.

$H_1 : \hat{\beta}_4 > 0$ artinya anggaran kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.

Koefisien regresi digunakan untuk mengetahui besar tidaknya pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Uji t dapat dilakukan dengan membandingkan nilai *probability* dengan taraf signifikannya. Apabila nilai probabilitas $< \alpha$ maka koefisien variabel tersebut signifikan mempengaruhi variabel terikat dan sebaliknya. Pengujian terhadap hasil regresi dilakukan dengan menggunakan uji t pada derajat keyakinan 95% atau $\alpha = 5\%$ dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jika nilai *probability* t-statistik $< 0,05\%$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima
2. Jika nilai *probability* t-statistik $> 0,05\%$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak

3.4.2 Uji Secara Simultan (Uji F)

Uji F (uji simultan) digunakan untuk menguji apakah secara bersama-sama variabel bebas mempengaruhi variabel tak bebas.

Adapun langkah-langkah pengujian uji F sebagai berikut :

- a. Membuat hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_1) sebagai berikut :

$H_0 : \hat{\beta}_i = 0, i = 1, 2, 3, 4$ berarti variabel bebas secara serempak/keseluruhan

tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

H_1 : β_i tidak semua nol , $i = 1, 2, 3, 4$ berarti variabel bebas secara serempak/keseluruhan berpengaruh terhadap variabel terikat.

- b. Mencari nilai F hitung ada nilai kritis F statistik dari tabel F. Nilai kritis F dengan tingkat rate dan df untuk *numerator* (k-1) dan df untuk *denominator*(n-k).

Rumus untuk mencari F_{hitung} adalah :

$$F_{hitung} = \frac{JKR(k-1)}{JKG(n-k)}$$

JKR : Jumlah Kuadrat Regresi

JKG : Jumlah Kuadrat Galat

k : Banyaknya koefisien regresi

n : Banyaknya sampel

Apabila nilai $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima, artinya variabel bebas secara bersama-sama (simultan) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Sebaliknya, bila nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak, artinya secara bersama-sama (simultan) variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

3.4.3 Uji Kebaikan-Suai : Koefisien Determinasi (R^2)

Uji kebaikan-suai bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi linier berganda yang digunakan sudah sesuai menganalisis hubungan antara variabel takbebas dengan variabel-variabel bebas. Untuk melihat kebaikan-suai model yang digunakan koefisien determinasi R^2 untuk mengukur seberapa besar keragaman variabel takbebas yang dapat dijelaskan oleh keragaman variabel-variabel bebas. Nilai koefisien determinasi R^2 adalah $0 \leq R^2 \leq 1$; $R^2 \rightarrow$

1 artinya jika angkanya mendekati 1 maka semakin baik garis regresi karena mampu menjelaskan data aktualnya.

3.5 Uji Penyimpangan Asumsi Klasik

3.5.1 Multikolinieritas

Menurut Agus Widarjono "multikolinieritas adalah hubungan linier antara variabel independen di dalam regresi."²⁰ Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen.

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang kuat (korelasi yang kuat) diantara variabel bebas. Variabel-variabel bebas yang mempunyai hubungan tidak mungkin dianalisis secara terpisah pengaruhnya terhadap variabel terikat. Pengaruhnya terhadap nilai taksiran :

- a. Nilai-nilai koefisien mencerminkan nilai yang benar.
- b. Karena galat bakunya besar maka kesimpulan tidak dapat diambil melalui uji-t.
- c. Uji-t tidak dapat dipakai untuk menguji keseluruhan hasil taksiran.
- d. Tanda yang dihadapkan pada hasil taksiran koefisien akan bertentangan dengan teori.

Salah satu cara untuk mendeteksi adanya gejala multikolinieritas adalah dengan melihat VIF (*Variance Inflation Factor*). Apabila nilai $VIF \leq 10$ dan $Tol \geq 0.1$ maka dianggap tidak ada pelanggaran multikolinieritas, namun bila sebaliknya $VIF \geq 10$ dan $Tol \leq 0.1$ maka dianggap ada pelanggaran multikolinieritas. Untuk mengetahui seberapa kuat atau seberapa parah kolinieritas

²⁰ Agus Widarjono, *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya*, Edisi 4, Yogyakarta, UPP STIM YKPN, 2013, hal 104

(korelasi) antar sesama variabel bebas maka dapat dilihat dari matriks korelasi. Bila nilai matriks $> 0,95$ maka kolinearitasnya serius (tidak dapat ditolerir). Namun bila sebaliknya nilai matriks $< 0,95$ maka kolinearitas dari sesama variabel bebas masih dapat ditolerir. Cara lain yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya multikolinearitas adalah dengan menggunakan cara regresi sekuensial antara sesama variabel bebas. Nilai R^2 sekuensial dibandingkan dengan nilai R^2 pada regresi model utama. Jika R^2 sekuensial lebih besar daripada nilai R^2 pada model utama maka terdapat multikolinearitas.

3.5.2 Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear terdapat korelasi antara galat (kesalahan pengganggu, *disturbance error*) pada periode waktu t dengan galat pada periode waktu $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya.

Ada beberapa cara untuk menguji keberadaan serial autokorelasi, yaitu dengan uji Durbin Watson (uji D – W) dan uji Run.

a. Uji Durbin-Watson

Uji Durbin-Watson hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (*first order autocorrelation*) dan mensyaratkan adanya intercept (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel *lag* di antara variabel independen. Uji Durbin-Watson dirumuskan sebagai berikut:

Dengan jumlah sampel dan jumlah variabel tidak bebas tertentu diperoleh dari nilai kritis d_l dan d_u dalam tabel distribusi Durbin-Watson untuk berbagai nilai n . Secara umum bisa diambil patokan:

1. Angka D – W di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif.
2. Angka D – W di antara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi.
3. Angka D – W di atas +2 berarti ada autokorelasi negatif.

Secara umum bisa diambil patokan :

$0 < d < dL$: menolak hipotesis 0 (ada autokorelasi positif)

$dL < d < dU$: daerah keragu-raguan (tidak ada keputusan)

$dU < d < 4-dU$: gagal menolak hipotesis 0 (tidak ada autokorelasi positif / negatif)

$4-dU < d < 4-dL$: daerah keragu-raguan (tidak ada keputusan)

$4-dL < d < 4$: menolak hipotesis 0 (ada autokorelasi negatif)

b. Uji Run

Untuk mendeteksi ada atau tidak adanya autokorelasi dalam model yang digunakan dapat juga digunakan uji Run. Uji ini digunakan apabila uji D-W menunjukkan autokorelasi. Namun jika uji D-W sudah dapat memastikan ada tidak nya autokorelasi dalam model regresi linear tersebut, maka uji Run tidak diperlukan lagi. Uji Run merupakan bagian dari statistika nonparametrik dapat digunakan untuk menguji apakah antar galat terdapat korelasi yang tinggi. Jika antar galat (residu atau kesalahan pengganggu) tidak terdapat hubungan korelasi maka dikatakan bahwa galat adalah acak atau radom. “Run test digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak (sistematis).”

Cara yang digunakan dalam uji Run adalah sebagai berikut :

H_0 : Galat (res_1) acak (random)

H_1 : Galat (res_1) tidak acak

3.5.3 Normalitas

Sesuai teorema Gauss Markov :

$$Y_i = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 X_{1i} + \hat{\beta}_2 X_{2i} + \dots + \varepsilon_i$$

1. $\varepsilon_i \sim N(0, \sigma^2)$ Apakah galat (distribusi error) menyebar normal atau tidak.
2. ε_i tidak terjadi autokorelasi.

Asumsi klasik yang lain dalam pendugaan dengan menggunakan penduga OLS adalah kenormalan. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel galat atau residu memiliki sebaran normal. Penggunaan uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai galat menyebar normal. "Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil." untuk mendeteksi apakah galat menyebar normal atau tidak digunakan analisis grafik dan uji statistik.

1. Analisis Grafik

Untuk menguji normalitas galat dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antar data pengamatan dengan sebaran yang mendekati sebaran normal. Caranya adalah dengan melihat sebaran peluang normal yang membandingkan sebaran kumulatif dari sebaran normal. Sebaran normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan diagram data galat akan dibandingkan dengan garis diagonal tersebut. Jika sebaran data galat atau residu normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonal.

2. Uji Statistik

Untuk menguji apakah galat atau residu menyebar normal dengan menggunakan grafik dapat memberikan kesimpulan yang tidak tepat kalau tidak hati-hati secara visual. Oleh sebab itu dilengkapi dengan uji statistik, yaitu dengan melihat nilai kemencengan atau penjuluran (skewness) dan keruncingan (kurtosis) dari sebaran galat. Menurut Ghosali nilai z statistik untuk kemencengan dan nilai z keruncingan dapat dihitung dengan rumus, yaitu sebagai berikut :

$$Z_{skewness} = \frac{skewness}{\frac{6}{n}} \text{ dan } Z_{kurtosis} = \frac{kurtosis}{\frac{24}{n}}, \text{ dimana } n \text{ adalah ukuran sampel.}$$

Menurut Ghozali “uji statistik lain yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik nonparametrik Kolmogorof-Smirnov (K-S). Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis sebagai berikut :

H_0 : Data galat (residu) menyebar normal

H_1 : Data galat tidak menyebar normal.”²¹

3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini Indeks Pembangunan Manusia digunakan sebagai variabel dependen yang merupakan tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel bebas. Selanjutnya variabel independen yang digunakan adalah pengangguran terbuka, kemiskinan, anggaran pendidikan, dan anggaran kesehatan.

Adapun definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Indeks Pembangunan Manusia (Y)

IPM dijadikan indikator untuk mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup yang menyangkut 3 bidang yaitu pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Dalam penelitian ini adalah IPM provinsi Sumatera Utara tahun 2008-2018. Sumber data diperoleh dari BPS dan satuannya dalam persen pertahun.

2. Pengangguran Terbuka (X1)

Pengangguran yaitu seorang yang sudah termasuk dalam golongan angkatan kerja, tetapi belum mendapatkan pekerjaan atau sedang mencari kerja. Dalam penelitian ini adalah

²¹ H. Iman Ghozali, “Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21”, edisi 8, Badan Penerbit Universitas Semarang, hal. 164.

tingkat pengangguran terbuka yang ada di provinsi Sumatera Utara tahun 2008-2018. Sumber data diperoleh dari BPS dan satuannya dalam persen pertahun.

3. Kemiskinan (X2)

Kemiskinan merupakan suatu keadaan atau ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar atau hidup dibawah standar hidup layak. Dalam penelitian ini kemiskinan adalah merupakan persentase penduduk miskin yang ada di provinsi Sumatera Utara tahun 2008-2018. Sumber data diperoleh dari BPS dan satuannya persen pertahun.

4. Anggaran Pendidikan (X3)

Anggaran pendidikan merupakan alokasi dana dari APBN yang dialokasikan pemerintah untuk beasiswa atau bantuan dana BOS kepada masyarakat yang tidak mampu atau kepada anak-anak yang pintar untuk dapat melanjutkan pendidikannya. Dalam penelitian ini adalah anggaran pendidikan yang ada di provinsi Sumatera Utara tahun 2008-2018. Sumber data diperoleh dari DJPK kemenkeu Indonesia dan satuannya dalam rupiah.

5. Anggaran Kesehatan (X4)

Anggaran kesehatan merupakan anggaran pemerintah dalam pemenuhan hak-hak kesehatan bagi warga negara. Dalam penelitian ini adalah anggaran kesehatan yang ada di provinsi Sumatera Utara tahun 2008-2018. Sumber data adalah DJPK Kemenkeu Indonesia dan satuannya dalam rupiah.